

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA SEKTOR INFORMAL

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
email: rudysp@bappenas.go.id

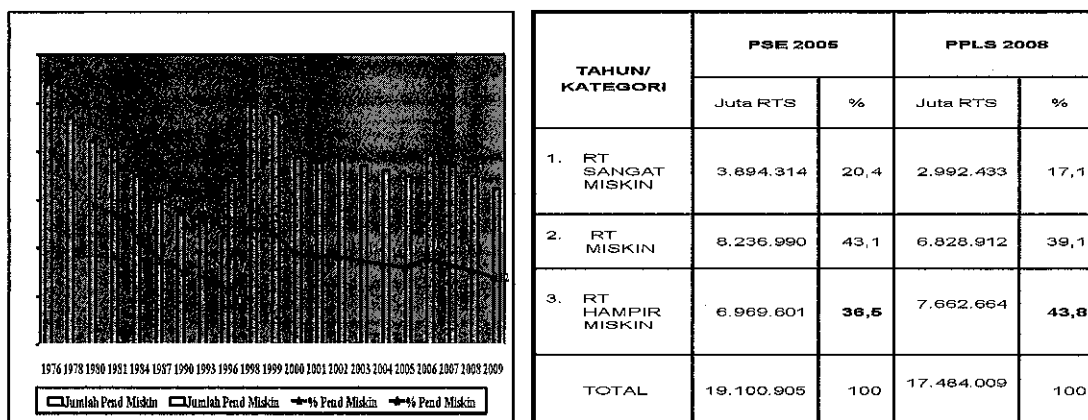
ABSTRAK

Kajian ini mengangkat sektor informal dalam dua definisi, yaitu sebagai badan usaha (*establishment*) dan sebagai pekerja. Jika dikaitkan dengan isu kemiskinan, maka pokok pembahasannya adalah pada individu pekerja sektor informal. Secara lebih spesifik, wujud nyata dari pekerja sektor informal adalah pedagang kaki lima/PKL (*street trading/street hawker*) yang didefinisikan sebagai orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Dengan kacamata yang lebih jernih, banyak manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan PKL, di samping ketidaknyamanan dan ketidak-teraturan mereka. Melalui kajian ini, ditawarkan beberapa alternatif penantaan PKL berdasarkan pengalaman dari beberapa strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang dapat dijadikan contoh dalam rangka membantu memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran.

1. LATAR BELAKANG

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang sangat memiliki spektrum luas, yang terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tercakup dalam 3 (tiga) klaster program yang bersifat afirmasi kepada masyarakat miskin. Dalam sepuluh tahun terakhir, penanggulangan kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan sudah menunjukkan penurunan dari sebesar 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi sebesar 13,33 persen pada tahun 2010 (Gambar1). Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan terasa semakin lambat dan jumlah masyarakat miskin juga masih cukup besar yaitu sebesar 31,02 juta. Dari sisi jumlah tersebut, berdasarkan data rumah tangga sasaran (sangat miskin, miskin dan hampir miskin) yang memiliki nama dan alamat (*by name and by address*), yang digunakan untuk program Klaster 1, ternyata proporsi rumah tangga sangat miskin dan miskin menurun, namun proporsi rumah tangga hampir miskin meningkat, yaitu dari 36,5 persen pada tahun 2005 (PSE 05) menjadi 43,8 persen pada tahun 2008 (PPLS 2008).



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Proporsi Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Perubahan proporsi rumah tangga sasaran tersebut dapat dikatakan bahwa program afirmasi (keberpihakan) untuk penanggulangan kemiskinan, yang melalui 3 Klaster, sudah mampu membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya, namun ternyata baru mampu meningkatkan sampai ke garis kemiskinan atau sedikit di atas garis kemiskinan. Dengan kata lain, tanpa perluasan lapangan kerja dan kegiatan usaha yang lebih baik, mereka masih akan berada pada kelompok yang miskin dan rentan yang sewaktu-waktu dapat kembali ke kemiskinan. Sehubungan dengan itu, keterkaitan dan akses masyarakat ini kepada kegiatan produktif dan lapangan pekerjaan sangat penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan lebih berkelanjutan (*sustainable*).

Sementara itu, apabila kita melihat data ketenagakerjaan, tampak bahwa memang terjadi penurunan tingkat pengangguran dari waktu ke waktu. Namun demikian, ternyata jumlah penganggur terdidik dan proporsi tenaga di sektor informal lebih besar dan ada kecenderungan meningkat. Melihat data ini, maka dapat dikatakan bahwa selain sektor informal dapat menjadi pijakan penting bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan (mengentaskan diri dari kemiskinan), maka sektor informal juga sangat penting ditangani dengan baik, karena menjadi sumber kehidupan semakin banyak tenaga kerja dan rumah tangga Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa *educated unemployed people* juga menjadikan sektor informal sebagai sumber/bidang usaha mereka.

2. TUJUAN

Tujuan umum dari kegiatan kajian ini adalah dalam rangka "Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan pada sektor Informal" sebagai dasar penyusunan Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. Secara spesifik, tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi jenis usaha, masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan usaha sektor informal di masyarakat. Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah teridentifikasinya beberapa hal, antara lain: (i) jumlah penduduk miskin yang berada pada sektor informal; (ii) peran sektor informal terhadap upaya penanggulangan kemiskinan; (iii) strategi penanganan sektor informal untuk penanggulangan kemiskinan; (iv) pentahapan penataan sektor informal menjadi sektor formal. Sehingga manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah adanya strategi pengembangan usaha sektor informal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan baik di daerah maupun secara Nasional.

3. METODOLOGI

3.1 KERANGKA ANALISIS

Analisis yang dilakukan dalam kegiatan kajian ini adalah dengan model Input-Output (I-O) yang dilakukan dalam lima tahap sebagai berikut:

Tahap I : Penyusunan tabel I-O;

Tahap II : Penyusunan tabel I-O (prediksi), menambahkan sektor informal;

Tahap III : Penyusunan tabel I-O nasional tersebut pada tahap II dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode "*non survey*" dan metode "*survey*". Metode "*non survey*" digunakan untuk menurunkan atau meng "*up date*" nilai semua sektor produksi/ekonomi dan komponen lainnya pada tabel I-O Kabupaten/kota menjadi tabel I-O nasional;

Tahap IV : Pembuatan struktur tabel I-O Kabupaten/kota;

Tahap V : Analisis dampak pelaksanaan usaha sektor informal terhadap peningkatan perekonomian nasional dengan menggunakan Model I-O sebagai berikut.

3.2 METODE PELAKSANAAN KAJIAN

Metodologi dalam penelitian ini adalah gabungan (*mixed-research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta berbagai teknik pengumpulan data seperti kuesioner, *focused group discussion* dan dokumen penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini dimulai dari observasi lapangan, penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, *focus group discussion*, hingga penggunaan *analitical hierarchy process* (AHP) untuk menggali dan menawarkan alternatif model kebijakan dalam pengembangan sektor informal.

Metoda kuantitatif diterapkan pada waktu menganalisis kontribusi/dampak keberadaan sektor informal terhadap peningkatan perekonomian nasional, digunakan analisis "*Model Input- Output*". Selanjutnya, metoda kualitatif dilakukan untuk:

1. Mengetahui kondisi nyata sektor informal di lapangan, terutama di berbagai daerah penelitian yaitu di Kota Solo, Yogyakarta, Bandung dan Palembang. Keragaman keadaan nyata sektor informal di kota-kota ini akan membantu memahami keberadaan dan kondisi sektor informal serta karakteristik mereka;
2. Mengetahui faktor-faktor kelembagaan yang ada pada sektor informal, terutama dari sisi pelaku di sektor informal dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang ada. Pengamatan ini juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelaku sektor informal terhadap kebijakan pemerintah;
3. Mengetahui pandangan Pemerintah Daerah terhadap sektor informal serta pandangan mereka terhadap penyediaan kebijakan yang ada;
4. Menggali pengalaman Pemda dalam mengelola sektor informal di daerahnya masing-masing.
5. Menawarkan alternatif kebijakan yang tepat terhadap pemberdayaan sektor informal berdasarkan kondisi faktual, pandangan para stakeholder (PKL, Pemerintah, NGO) dan akademisi.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. DEFINISI DAN DATA SEKTOR INFORMAL

Dalam berbagai kesempatan, sektor informal seringkali juga disebut secara umum sebagai "usaha sendiri". Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, yang sulit dicacah, dan karena itu sering dilupakan dalam sensus resmi. Sebagai akibatnya tidak ada data resmi mengenai pelaku di sektor ini dan persyaratan kesempatan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Per definisi sektor informal ada dua, yaitu sebagai badan usaha (*establishment*) dan sebagai pekerja.

Data pekerja sektor informal bersumber dari data Sakernas, yang mendata mengenai lapangan pekerjaan, status, jenis dan tingkat pendidikan. Sedangkan usaha informal bersumber dari Sensus Ekonomi dan Survey Usaha Terintegrasi (SUSI). Dalam menganalisa keterkaitan sektor informal dengan kemiskinan, fokus pembicaraan akan difokuskan pada individu pekerja sektor informal. Berdasarkan data BPS (Sakernas), cakupan definisi sektor formal dan informal dapat dilihat berdasarkan status dan jenis pekerjaannya (*occupation*). Status pekerja informal pada umumnya pada level manajemen (direktur/manajer) tingkat rendah (pekerja keluarga), atau pada umumnya memiliki status pekerjaan di bidang pertanian. Spektrum lengkapnya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Definisi Sektor Formal dan Informal berdasarkan status dan jenis pekerjaannya

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Tanpa Bantuan Orang Lain	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dengan Bantuan Buruh										
Tidak Tetap	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dengan Bantuan Buruh Tetap	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pekerja dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	F
Pekerja Bebas Pertanian	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	F
Pekerja Bebas Non-Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Sumber : BPS
Keterangan : F = Formal
INF = Informal

Dengan menggunakan definisi pekerja formal-informal, perkembangan komposisi tidak berubah secara signifikan, dan pekerja informal tetap merupakan penyerap pekerja terbanyak. Namun demikian, komposisi di dalam pekerja informal menunjukkan perubahan. Jumlah pekerja informal yang berusaha sendiri tanpa dibantu terus menunjukkan peningkatan. Demikian pula pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian serta pekerja tanpa upah. Penurunan dari pekerja informal terjadi pada pekerja yang berusaha dengan bantuan tenaga lain (Tabel 2).

Tabel 2 Gambaran Pekerja Formal-Informal Indonesia Menurut Status Pekerja Utama (dalam ribu pekerja)

Status		Tahun		
		2002	2004	2008
Formal	1. Berusaha dengan buruh tetap	2.786,2	25.049,7	2.965,8
	2. Buruh/karyawan	25.459,5	2.979,4	28.515,3
Informal	1. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	17.632,9	22.019,4	4.513,6
	2. Berusaha dengan dibantu orang lain	3.560,0	16.085,3	18.309,3
	3. Pekerja bebas pertanian	21.512,4	4.450,0	3.732,8
	4. Pekerja bebas non pertanian	17.292,1	20.081,1	21.600,0
	5. Pekerja keluarga tanpa upah	6.130,5	4.798,9	17.944,8

Sumber : BPS, berbagai tahun.

4.2. UPAYA PERBAIKAN DEFINISI DAN DATA SEKTOR INFORMAL

Pada tahun 2009, BPS bekerja sama dengan ADB (RETA 6430: *Measuring the Informal Sector*) melakukan Survei Sektor Informal (SSI) 2009 di Provinsi Di Yogyakarta dan Banten dengan menggunakan konsep baru yang terbanding secara internasional yang dapat mengukur pekerja informal, jenis unit produksi sektor informal, serta share PDRB sektor informal. Uji coba penyesuaian konsep sektor informal merupakan dinamika dari pergeseran kondisi dan pengukuran yang lebih mendekati pada fakta sebenarnya mengenai sektor informal. Dari hasil survei tersebut diperoleh pemahaman dan pengertian yang relatif berbeda

dengan pengertian-pengertian sebelumnya. Pekerjaan informal terdiri dari jumlah pekerjaan informal apakah dilaksanakan di perusahaan sektor formal, sektor informal, atau rumah tangga. Dengan demikian sektor informal mencakup :

- Berusaha sendiri dan pengusaha yang bekerja pada perusahaan sektor informal mereka sendiri
- Pekerja keluarga, tanpa memperhatikan apakah mereka bekerja pada perusahaan sektor formal ataupun informal
- Anggota dari koperasi produksi informal
- Buruh/karyawan yang memiliki pekerjaan informal pada perusahaan sektor formal, sektor informal, atau pembantu rumah tangga, jika tidak tunduk pada UU tenaga kerja, pajak pendapatan, perlindungan sosial dsb.
- Berusaha sendiri yang terlibat dalam produksi barang yang semata-mata untuk konsumsi sendiri oleh rumahtangganya

Sektor informal secara luas dapat dicirikan terdiri dari unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan kepada orang yang bersangkutan. Unit ini biasanya beroperasi dengan:

- Organisasi tingkat rendah,
- Dengan sedikit atau tanpa pembagian antara tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi dan dalam skala kecil.
- Hubungan tenaga kerja sebagian besar didasarkan pada pekerjaan tidak tetap, kekerabatan atau hubungan pribadi dan hubungan sosial daripada kontrak perjanjian dengan jaminan resmi.

Unit produksi dari sektor informal memiliki karakteristik sebagai perusahaan rumah tangga dengan aset tetap dan aset lainnya yang digunakan bukan milik unit produksi tetapi kepunyaan pemiliknya. Unit seperti ini tidak dapat melakukan transaksi atau terlibat kontrak dengan unit lain, atau mendapatkan pinjaman atas nama mereka sendiri, pemilik harus mencari sumber dana dengan risikonya sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batas, untuk hutang atau kewajiban yang timbul dalam proses produksi. Pengeluaran produksi sering kali tidak dapat dibedakan dari pengeluaran rumah tangga, barang-barang modal seperti bangunan atau kendaraan tidak dapat dibedakan antara keperluan rumah tangga dan keperluan usaha.

Pekerjaan di sektor informal mencakup semua pekerjaan atau semua orang di usaha sektor informal, yang selama periode referensi tertentu, bekerja di setidaknya satu usaha sektor informal, tanpa memperhatikan status pekerjaan mereka dan apakah itu merupakan pekerjaan utama mereka atau bukan. Pekerjaan informal dicirikan oleh :

- Ketiadaan kontrak,
- Ketiadaan perlindungan sosial,
- Ketiadaan hak untuk berbagai jaminan dan
- Tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua:

- usaha sendiri informal dan
- pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal.

Yang termasuk usaha sendiri informal:

- pengusaha pada sektor informal,
- berusaha sendiri pada usaha informal,
- pekerja keluarga tidak dibayar dan
- anggota koperasi produksi informal

4.3. SEKTOR INFORMAL – KEADAAN DI LAPANGAN

4.3.1. Karakteristik

Formal vs Informal. Berdasarkan kajian berbagai sumber tentang sektor informal beberapa informasi karakteristik pembeda sektor formal dan informal dapat dilihat dari: (i) keteraturan cara kerja, (ii) hubungan dengan perusahaan, (iii) curahan waktu, serta (iv) status hukum kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan karakteristik tersebut, beberapa karakteristik sektor informal adalah: mudah masuk; bergantung pada sumberdaya sendiri; kepemilikan keluarga; beroperasi pada skala kecil; padat tenaga kerja; teknologi sendiri; kemampuan didapatkan diluar pendidikan formal; tidak ada peraturan, pasar sangat terbuka dan kompetitif. Sedangkan karakteristik sektor formal adalah: sulit masuk; bergantung pada sumberdaya dari luar; kepemilikan perusahaan; skala besar; padat modal atau modal besar; teknologi impor; kemampuan didapatkan dari pendidikan formal, menggunakan beberapa tenaga asing/ekspatriat; pasar terproteksi (tarif, kuota, ijin perdagangan). Berdasarkan data yang ada, bagian terbesar dari sektor informal, status pekerja adalah pemilik/operator; dikerjakan sendiri dengan beberapa pekerja upahan.

Tipe perusahaannya adalah: usaha mikro; bisnis keluarga; sub kontrak/ bukan unit tetap. Namun bila melihat wujud luarnya hampir dapat dikatakan seluruh sektor adalah usaha mikro, tetapi bila digali lebih mendalam ternyata usaha mikro terbagi dalam beberapa bentuk. Pertama adalah usaha mikro milik sendiri. Kedua kelompok yang menjalankan usaha keluarga, ada yang bersifat turun temurun, tapi ada yang hanya menjalankan usaha saudaranya sebagai pekerja (sistem fee/upah). Ketiga perusahaan sub kontrak/bukan unit tetap, kelompok ini merupakan unit usaha yang telah memiliki peralatan dan keahlian cukup, tetapi usahanya hanya menjalankan pesanan kelompok usaha yang lebih besar, atau dalam lapangan sering dikenal dengan istilah makloon.

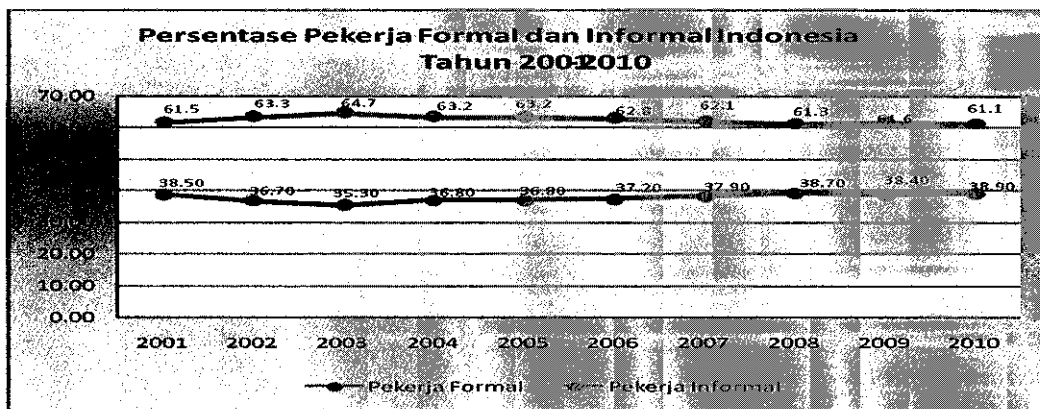
Pilihan atau Keterpaksaan?. Hal yang menarik dari adanya sektor informal adalah apakah sektor informal merupakan pilihan atau terpaksa? Tumbuhnya sektor informal disebabkan dan didorong oleh adanya: (i) Industrialisasi dan pembangunan bias kota; (ii) Memburuknya perbandingan lahan untuk bertani dengan jumlah penduduk, serta memburuknya bentuk pola kepemilikan tanah; (iii) Meningkatnya jumlah penganggur dan berlakunya upah rendah di sektor formal; (iv) Tingginya pendidikan berkorelasi negatif dengan pekerjaan di sektor pertanian; (v) Penguasaan sebagian kecil penduduk pada bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan investasi; (vi) Dualisme sosial, ekonomi dan teknologi. Faktor lain yang merupakan cerminan dari tumbuhnya sektor informal adalah: (i) merupakan buah dari benih-benih kewirausahaan; (ii) Bentuk dari diversifikasi usaha; (iii) Sistem patronas; (iv) Penyangga dari sistem pekerjaan formal; (v) Faktor kultural

Ragam/bidang usaha Ekonomi Informal. Keragaman sektor informal sangat besar. Untuk melihat ragam tersebut, kita dapat melihat berdasarkan barang yang dijual dan cara menjajakannya. Berdasarkan jenis barang yang dijual dapat ditemui sektor informal yang menjual/berusaha di bidang: (i) produksi pertanian; (ii) makanan dan minuman; (iii) makanan hasil olahan pabrik; (iv) barang pabrik bukan makanan; dan (v) pedagang tidak terampil. Berdasarkan cara menjajakan dapat ditemui: (i) pedagang yang menetap (permanen); (ii) menetap namun bongkar pasang atau berdagang hanya pada waktu tertentu saja (pagi, siang, atau malam saja); (iii) dorongan keliling, dan asongan.

4.3.2. Sektor Informal dan Kemiskinan.

Munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Oleh karena rendahnya tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi (migrasi desa ke kota) dan bekerja di sektor non pertanian.

Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal. Menurut data BPS, lebih dari 60 persen penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) bekerja di sektor informal. Untuk mengetahui proporsi jumlah pekerja di sektor informal pada tahun 2001-2010 dapat dilihat Tabel 3 sebagai berikut :



Sumber: Pengolahan data

Selanjutnya dari tabel 4 di bawah dapat dilihat bahwa sektor informal perkotaan telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Di mana dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 100 persen orang yang bekerja di sektor informal di perkotaan, 82,7 persen termasuk ke dalam kondisi yang tidak miskin sedangkan yang tergolong miskin dan hampir miskin memiliki proporsi yang jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal telah memberikan pendapatan yang memadai kepada masyarakat perkotaan sehingga menjadikan mereka golongan yang tidak termasuk miskin.

Tabel 4 Proporsi Pekerja Sektor Informal Menurut Status Tahun 2008

Status	Daerah	
	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
Miskin	6,3	29,9
Hampir Miskin	11,0	27,5
Tidak Miskin	82,7	42,6

Sumber: World Bank Office Indonesia Poverty Team

Sementara itu di daerah pedesaan, sebanyak 57,5 persen pekerja sektor informal masih tergolong dalam kondisi miskin dan hampir miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor informal pedesaan belum banyak dapat membantu mereka untuk terlepas dari kondisi kemiskinan, yang disebabkan pendapatan yang mereka peroleh sebagai pekerja di sektor informal masih rendah atau belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Beberapa studi mengungkapkan bahwa membengkaknya sektor informal yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia disebabkan karena terbatasnya daya serap sektor modern atau formal terhadap angkatan kerja. Terbatasnya daya serap sektor

formal atau modern ini karena tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang tinggi, padahal di lain pihak sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih mempunyai pendidikan yang rendah. Akibatnya tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal terpaksa masuk ke sektor informal yang tidak membutuhkan persyaratan apa-apa seperti di sektor formal.

4.3.3. PKL sebagai bagian dari Sektor Informal

Pedagang kaki lima/PKL (street trading/street hawker) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).

Istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris. Diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dalam feet sama dengan kaki, atau 1,5 meter. Pedagang yang berjualan ditrotoar tersebut kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Jika melihat modal kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit. Mereka berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktifitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Anggapan bahwa PKL adalah "penyakit kota" yang mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Padahal jika mau jujur, kemacetan itu biangnya adalah konsentrasi keramaian. konsentrasi keramaian yang secara tidak bijak telah diciptakan oleh kebijakan pembangunan itu sendiri. Disamping karena memang kurangnya budaya tertib di masyarakat kita. Tetapi yang tidak tertib itu, sesungguhnya melanda semua pihak; para pengusaha dan para pejabat juga. Termasuk para pedagang kecil, pejalan kaki, angkot dan tukang becak. Tidaklah bijak, jika hanya menyalahkan mereka yang kecil. Pembangunan mal-mal yang meringsek ditengah kota dengan menggusur berbagai ruang publik dan cagar budaya, adalah bukti bahwa mereka para pengusaha dan pejabat tidak pernah mau tertib. Jika kita mau melihat dengan kaca mata yang lebih jernih, kita bisa menemukan banyak manfaat sosial dari PKL, di samping ketidaknyamanan dan ketidak-teraturan mereka. Dibawah ini beberapa alasan mengapa PKL penting untuk dipikirkan:

1. PKL merupakan salah satu penyangga perekonomian rakyat, yang mandiri, kuat dan membuka lapangan kerja bagi banyak pihak disekeliling mereka.
2. Usaha PKL mampu mendukung industri secara makro. Karena pada prakteknya, justru usaha PKL yang menjadi pengecer langsung barang-barang yang diproduksi industri besar.
3. Pada saat yang sama, PKL mampu memberikan barang-barang alternative dengan harga yang terjangkau.
4. Dalam beberapa survey yang dilakukan terhadap PKL di banyak kota-kota besar di Indonesia, PKL justru menjadi bumper penduduk kota dari penjajah jalanan.
5. PKL juga mendatangkan pendapatan terhadap pemerintah daerah.

4.4 ANALISA KONTRIBUSI SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN TERHADAP KETERKAITAN ANTAR SEKTOR:

4.4.1. Angka Pengganda Output (Output Multiplier)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel input-output diperoleh angka pengganda output sebagai berikut:

Tabel 5 Angka Pengganda Output

No.	Sektor	Sebelum Menginternalisasi Sektor Informal (IO)	Sesudah Menginternalisasi Sektor Informal (IO ^{**})	Perubahan (Persen)
1.	Pertanian, pertambangan, Penggalian	1,374	1,378	0,36
2.	Industri Pengolahan	2,164	2,185	1,00
3.	Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan	2,291	2,311	0,92
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi	1,859	1,873	0,74
5.	Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa	1,794	1,808	0,76

Sumber : Pengolahan Data

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa sektor informal memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap jumlah output, dengan pengaruh terbesar ada pada sektor informal di industri pengolahan.

4.4.2. Angka Pengganda Pendapatan (Income Multiplier)

Untuk melihat angka pengganda pendapatan dari hasil analisis input-output akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6 Angka Pengganda Pendapatan

No.	Sektor	Sebelum	Sesudah	Perubahan (persen)
		Menginternalisasi Sektor Informal (IO)	Menginternalisasi Sektor Informal (IO*)	
1.	Pertanian, Pertambangan, Penggalian	1,379	1,380	0,09
2.	Industri Pengolahan	2,552	2,575	0,87
3.	Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan	2,440	2,456	0,65
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi	1,828	1,834	0,35
5.	Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa	1,471	1,475	0,27

Sumber : Pengolahan data

Hasil analisis berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa sektor informal meningkatkan angka pengganda pendapatan dengan pengaruh terbesar berada pada sektor informal di industri pengolahan.

4.4.3 Keterikatan Antara Sektor (Linkages)

Untuk melihat pengaruh sektor informal terhadap keterkaitan antar sektor-sektor industri ke belakang dan ke depan, dilakukan analisis keterkaitan sebelum dan sesudah menginternalisasikan sektor informal dalam tabel input output perekonomian Indonesia sebagai berikut :

Tabel 8 Analisis Keterkaitan Antar Sektor-sektor Industri

Sektor	Keterkaitan Sebelum Menginternalisasi Sektor Informal (IO)		Keterkaitan Sesudah Menginternalisasi Sektor Informal (IO*)		Perubahan (persen)	
	Backward	Forward	Backward	Forward	Backward	Forward
	1.	0,721	0,982	0,724	1,001	0,043
2.	1,141	1,588	1,143	1,632	0,209	2,768
3.	1,208	0,617	1,209	0,623	0,111	0,016
4.	0,980	0,901	0,981	0,911	0,102	0,008
5.	0,946	0,868	0,946	0,877	0,011	0,024

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 1 = Pertanian, Pertambangan, Penggalian; 2 = Industri Pengolahan; 3 = Listrik, Gas, Air bersih, Bangunan; 4 = Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi; 5 = Keuangan, Perbankan, Jasa-jasa

Analisis tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh sektor informal di Indonesia seluruhnya telah mampu meningkatkan keterkaitan, baik ke belakang maupun ke depan dalam seluruh sektor. Perubahan positif ke belakang maupun ke depan yang terjadi pada seluruh sektor-sektor industri tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sektor informal, kegiatan-kegiatan dalam seluruh sektor-sektor industri makin saling terkait satu sama lain.

4.5. PKL ANTARA USAHA RAKYAT DAN PERPANJANGAN TANGAN PEMILIK MODAL.

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan ternyata kegiatan usaha PKL perkotaan saat ini merupakan ceruk yang mempunyai prospek positif yakni, 57,5% pelaku PKL memiliki pendapatan diatas Rp 1.500.000. Walau begitu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa kehidupan para PKL sejahtera, karena senyatanya tidak semua pelaku PKL dapat merasakan pendapatan tersebut. Hanya PKL mandiri yang lebih merasakan manfaatnya. Secara umum pelaku PKL dapat dibagi dua yakni pelaku PKL mandiri dan PKL pekerja sebagai perpanjangan tangan pemilik modal.

Seluruh tipe PKL ternyata dapat memberikan kontribusi sebagai jaring pengaman sosial, ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Keduanya sama-sama menyerap tenaga kerja, baik yang terdidik maupun tidak terdidik. Hanya masing masing tipe PKL memiliki karakteristik, dan manajemen usaha yang berbeda, oleh karena itu kebijakannya yang di terapkan juga harus berbeda. Sebagai contoh: PKL mandiri sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, sistem pengelolaan dan manajemen usaha masih menggunakan sistem tradisional, sulit mengakses modal melalui lembaga keuangan formal, tetapi 100% keuntungan dapat dinikmati oleh para pedagang dan keluarganya. Pada PKL pekerja sudah menggunakan instrumen modern/semi modern, dan memiliki akses terhadap permodalan, tetapi kondisi pekerja berada posisi yang sangat rentan, sehingga penguatan perlindungan terhadap pekerja menjadi kebijakan yang penting pada PKL pekerja/perpanjangan tangan pemilik modal.

4.6. KELEMBAGAAN PKL

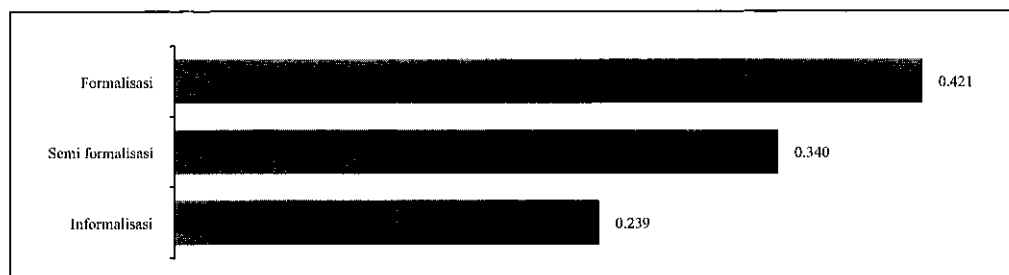
Kelembagaan PKL berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dari lima kota penelitian dan data sekunder dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu: Koperasi, Asosiasi/Perkumpulan, Asosiasi Onderbouw Ormas, dan Liar. Empat bentuk organisasi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan dalam rangka pengembangan usaha PKL. Organisasi yang

sangat diwaspadai adalah bentuk "Liar" karena organisasi ini hanya mengambil keuntungan dari para PKL atas penguasaan lahan, umumnya PKL tidak dapat bernegosiasi dengan para penguasa tersebut. Keuntungan yang didapat oleh PKL adalah akses terhadap kelengkapan dagang (Isitrik, kebersihan) dan sedikit jaminan atas usaha, termasuk bocoran terhadap operasi pengurusan yang dilakukan Pemda.

Berdasarkan kajian lapangan terlihat peran organisasi ini memiliki peran penting dalam pengembangan usaha PKL, sebenarnya lembaga ini dapat menjadi lembaga intermediary bagi PKL dan Pemerintah daerah dalam upaya penataan pedagang kaki lima. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan asosiasi adalah jangan sampai organisasi ini dijadikan lahan mobilisasi dan perebutan lahan bagi oknum-oknum tertentu.

4.7 ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SEKTOR INFORMAL (HASIL AHP)

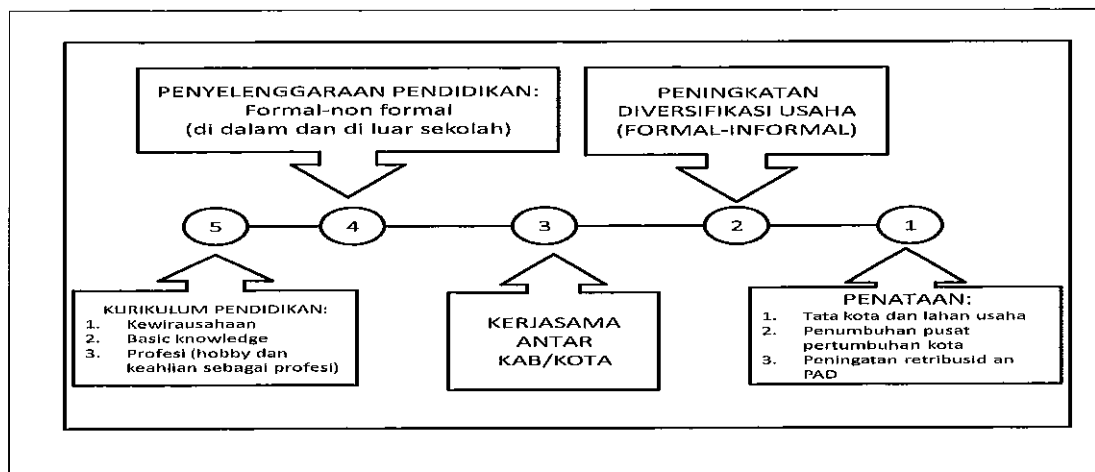
Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani sektor informal, dalam hal ini lebih khususnya masalah Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, namun untuk mendapatkan prioritas mana yang harus didahulukan memerlukan suatu metode tertentu dalam penelitian. Pemilihan alternatif kebijakan dapat ditentukan melalui suatu metode yang disebut Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analisis gabungan dari keempat alternatif pilihan menghasilkan proses formalisasi PKL adalah pilihan yang utama.



Makna yang didapat dari gambar di atas adalah dengan alasan kondisi ekonomi, maka keberadaan PKL menjadi layak untuk diformalkan. Ini tentunya akan berimplikasi pada munculnya peraturan untuk mengatur formalisasi PKL (ijin lokasi, pelatihan, dan lain-lain).

4.8 PEMIKIRAN KE DEPAN: PENGELOLAAN PKL

Pelaksanaan Focus Group Discussion yang sangat konstruktif mengenai permasalahan PKL di hampir setiap kota di Indonesia menghasilkan suatu rumusan atau langkah-langkah penanganan yang sistemik dan berkesinambungan. Hal ini tergambar pada bagan di dibawah ini.



Bagan Penanganan Sektor Informal secara Sistematis (Hulu-Hilir)

Langkah pertama yang harus diambil adalah pertama adalah melakukan penataan kota dengan mengelompokkan wilayah yang terbagi-bagi dalam berbagai jenis peruntukan. Salah satu peruntukan yang harus ada adalah mengalokasikan wilayah tertentu untuk lahan usaha, terutama lahan usaha untuk Pedagang Kaki Lima yang tergolong pengusaha UKM ini. Dalam hal penataan ini akan lebih baik dengan melibatkan para stakeholders, termasuk para pelaku Pedagang Kaki Lima yang dapat juga diwakili oleh asosiasinya. Kedua, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan kota, sehingga pertumbuhan kota tidak tersentral pada satu titik yang akan mengundang pedagang untuk berusaha di lokasi tersebut. Dengan berkembangnya berbagai macam usaha termasuk PKL di banyak pusat-pusat pertumbuhan kota akan meningkatkan potensi penerimaan PAD dari aspek retribusi daerah.

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah melakukan diversifikasi usaha, baik untuk usaha yang bergerak di sektor formal maupun sektor informal yang di dalamnya terdapat subsektor PKL. Peningkatan diversifikasi usaha ini penting dilakukan karena akan membuat lapangan kerja lebih banyak tersedia bagi penganggur. Dengan cara ini maka akan terjadi peningkatan penghasilan baik bagi yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan juga bagi yang sudah bekerja.

Langkah ketiga adalah melakukan kerjasama antar kota atau kabupaten, sehingga tidak akan terjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dalam satu kawasan regional yang nantinya akan mengundang orang untuk berkegiatan usaha di kota tersebut saja. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan urbanisasi tinggi pada kota yang pusat pertumbuhan ekonominya lebih besar daripada kota/kabupaten tetangganya.

Langkah keempat adalah menyelenggarakan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang berbasis kepada entrepreneurship (kewirausahaan), sehingga akan muncul manusia-manusia yang berjiwa usaha dan mandiri yang tidak mengandalkan pada lapangan pekerjaan yang tersedia, namun justru menciptakan lapangan kerja.

Langkah kelima sebagai langkah terakhir adalah melakukan pembenahan kurikulum dari sejak taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah sampai tingkat perguruan tinggi yang kesemuanya mendidik siswanya untuk menjadi orang yang berjiwa wirausaha dan mandiri. Mengajarkan pengetahuan dasar (basic knowledge) untuk berwirausaha sehingga nantinya akan didapat situasi hobi dan keahlian sebagai profesi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Di Indonesia, para pelaku usaha sektor informal meliputi jenis yang sangat beragam termasuk salah satunya adalah pedagang kaki lima. Jika dilihat dari komposisi tenaga kerja, sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal. Menurut data BPS, lebih dari 60 persen penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) bekerja di sektor informal. Dari seluruh pekerja informal tersebut 17,3 persen (di perkotaan) dan 57,4 persen (di perdesaan) masih tergolong miskin dan hampir miskin. Sektor informal berpotensi menjadi batu loncatan usaha/pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan bagi golongan miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Namun demikian perlu diperhatikan jaminan kepastian berusaha, bekerja dan jaminan sosial bagi mereka agar mereka tidak terperangkap dalam kemiskinan atau bulak balik keluar masuk kemiskinan karena mereka sangat rentan terhadap guncangan baik yang tertuju kepada kondisi lingkungan usaha/pekerjaannya maupun kesehatan pribadi pekerja informal tersebut.

Hal penting lainnya yang perlu dicatat bahwa hasil analisis menunjukkan sektor informal telah dapat memberikan efek pengganda (multiplier) yang positif baik terhadap total output, pendapatan dan kesempatan kerja. Dari lima sektor informal utama, diketahui sektor industri pengolahan memiliki nilai perubahan angka pengganda yang paling besar dibandingkan sektor industri lain, baik terhadap total output, pendapatan dan kesempatan kerja. Pada analisis keterkaitan antar sektor (linkages) menunjukkan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh sektor informal di Indonesia seluruhnya mampu meningkatkan keterkaitan, baik ke belakang (backward linkages) maupun ke depan (forward linkage) terhadap sektor-sektor formal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi PKL menjadi suatu safety net di kala seseorang tidak punya pekerjaan atau tidak dapat ditampung dalam sektor formal. Dengan demikian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus segera membuat strategi pengembangan PKL sebagai bagian dari pengembangan sektor informal dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Penganganan PKL tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan jangka pendek atau hit and run, tetapi harus dengan penanganan yang holistik dan konstruktif didukung kebijakan jangka menengah dan panjang. Hal ini harus dimulai dari kebijakan penataan PKL/sektor informal, peningkatan diversifikasi usaha baik formal dan informal, design kebijakan kerjasama antar daerah, penguatan penyelenggaraan pendidikan baik formal dan non formal (di dalam dan diluar sekolah) dan adanya kurikulum pendidikan yang mengakomodasi bidang kewirausahaan, pengetahuan dasar dan peluang keahlian profesi sebagai salah satu bidang yang menjanjikan.

5.2 REKOMENDASI

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan, sebaiknya disusun suatu kebijakan strategi pengembangan usaha sektor informal yang bersifat non-urban solution. Fokus dari kebijakan ini adalah mencegah agar tidak terjadi urbanisasi (migrasi) dari desa ke kota yang efeknya cenderung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dicapai jika dalam suatu perekonomian terdapat tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab terjadinya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan.

Salah satu bentuk pembangunan masyarakat yang mandiri dan berswadaya adalah dengan pengembangan sektor informal di desa terutama industri non pertanian. Prioritas pembangunan desa yang berintikan swasembada pangan hanya ditekankan pada produksi tanaman pertanian khususnya padi, hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil masyarakat desa yang memiliki lahan pertanian luas. Sedangkan yang memiliki lahan gurem dan buruh tani kurang memperoleh keuntungan dari program yang dijalankan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penyusunan program ataupun kebijakan pemerintah guna menciptakan kewirausahaan daerah perdesaan dengan harapan pelaku sektor informal memiliki wawasan bisnis yang luas, mampu mengelola modal yang baik dan dapat memasarkan hasil produknya.

Selain itu, kebijakan tentang kejelasan status dari sektor informal juga perlu dilakukan. Hal ini mengingat masih banyak kegiatan usaha sektor informal yang bertentangan dengan peraturan ataupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu pula keberadaan sektor informal kadang tidak kuat seperti sektor formal. Di

mana sektor informal karena ketidakjelasan sektor ini seringkali menyulitkan bagi mereka untuk mendapatkan modal ataupun memperluas usahanya. Oleh sebab itu, dengan adanya kejelasan status yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan akan semakin memperjelas eksistensi sektor informal baik dari segi usaha, lokasi, permodalan dan juga pemasaran hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Jennifer dan Paul, A. 1991. <http://www.jstor.org/pss/2803879>.
- Arief, S. 1993. *Metode Penelitian Ekonomi*. LPFE-UI : Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE : Jogjakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1995. *Survei Penduduk Antar Sensus (Supas)*. Jakarta.
- _____. 2000. *Sensus Penduduk*. Jakarta.
- _____. 2002. *Survei Tenaga Kerja Nasional*. Jakarta.
- _____. 2005. *Tabel Input Output Nasional*. Jakarta.
- _____. 2005. *Survei Ekonomi*. Jakarta.
- _____. 2009. *Survei Tenaga Kerja Nasional*. Jakarta.
- _____. 2009. *Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas)*. Jakarta.
- _____. 2009. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009*. Jakarta.
- _____. 2010. *Data dan Metodologi Untuk Kajian Sektor Informal di Indonesia*. Jakarta.
- Bappeda Provinsi DI Jogjakarta. 2004. *Laporan Akhir Strategi Sektor Informal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*. Kerja sama Bappeda DI Jogjakarta dengan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Universitas Gadjah Mada : Jogjakarta.
- Bappenas. 2009. *Kajian Evaluasi Pembangunan Nasional, Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta.
- _____. 2010. *Kajian Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pada Sektor Informal*. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Bappenas.
- Bernabe, Sabine. 2002. *Informal Employment in Countries in Transition : A Conceptual Framework*, Centre Analysis of Social Exclusion. London School of Economics : London.
- Buddhiracana. 2001. *Mobilitas Tenaga Kerja dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Budaya*. Vol. 2\No. 13\ Juni 2001 BKSNT : Bandung.
- Cuevas, S.et.all. 2008. *Informal Employment in Indonesia*, ADB.
- Daryanto, A dan Yundy, H. 2010. *Analisis Input Output dan Social Accounting Matrix Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. IPB Press : Bogor.
- Effendi, T., Noer. 1996. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana : Jogjakarta.
- Firnandy. 2002. *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*. Direktorat Ketenagakerja dan Analisis Ekonomi : Jakarta.
- Isdijoso, W. 2010. *Sekilas Profil Kemiskinan di Perkotaan*. Lembaga Penelitian Smeru. Jakarta.
- Manning, C. dan Effendi, T., N . 1993. *Sektor Informal. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Rachbini, D., J dan A. Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi Gelombang Kedua*. LP3ES : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. LPFE-UI : Jakarta.
- _____. 2000. *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Garfindo Persada : Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Haji Masagung : Jakarta.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara Jakarta.
- Winarso H dan Gede B. 2008. *Sektor Informal yang Terorganisasi : Menata Kota Untuk Sektor Informal*. Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung : Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
5. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
6. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010-2014.
7. Perpres Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2006

8. Perpres Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007
9. Perpres Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2008
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2009
11. Perpres Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2010
12. Perpres Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011
13. Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan
14. Inpres Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 35/KEP/MENKO/KESRA/X/2008 Tim Koordinasi Raskin Pusat
16. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras
17. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 jo. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
18. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri
19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.10/KEP/MENKO/KESRA/III/2008 tentang Tim Pengarah PSF
20. Keputusan Bulog KD- /DO201/01/2009 Pedoman Umum Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2009
21. Keputusan Bappenas No.150/D.III/KESRA/07/2008 tentang Tim Teknis PSF
22. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2009

Buku, Makalah, Media Massa dan Sumber Elektronik

1. Ardin, Sengkarut Penanggulangan Kemiskinan, FLAMMA Edisi 33, Januari - Maret 2010.
2. Harja Dadan Ramdan, Catatan Kritis Problematika Pemiskinan: Membuka Tabir Kelam untuk Keluar dari Jeratan Pemiskinan, diunduh dari, <http://www.inisiatif.org/index.php?view=article&catid=31%3Apengelolaan-pengetahuan-pengembangan-sumberdaya&id=150%3Apemiskinan&t...>, pada 13 Juni 2010 jam 08:35 WIB.
3. Lembaga Penelitian Smeru, Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat?, Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat? Yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian SMERU, Makassar, 23-24 Maret 2004.
4. Buku Laporan TKPK, Capaian Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2005-2009.
5. MIS UPPKH Pusat, Komponen SIM PKH, diunduh dari <http://pkh.depsos.go.id/index.php?opti...> pada tanggal 25 Agustus 2010.
6. Patunru Arianto A, Efisiensi, Inovasi, dan Birokrasi, diunduh dari <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/22/04021423/efisiensi.inovasi.dan.birokrasi>, pada 22 Juni 2010 jam 15:22 WIB.
7. Royat Sujana, Perlunya Pro-Poor dan Pro-Human Development Budgeting, diunduh dari <http://catatan-sr.blogspot.com/2008/08/perlunya-pro-poor-dan-pro-human.html>, tanggal 13/06/2010 jam 08:40.
8. Smeccda, Laporan Akhir Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang KUKM, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 2008.
9. Subandi I.H., Tapak-Tapak Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan, diunduh dari <http://www.pnpm-pisew.org/admin/files/Artikel-PISEW/TAPAK2.pdf> pada 13 Juni 2010 jam 08.53 WIB.
10. Suharto Edi, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung, Seminar Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos RI, Jakarta 2 Oktober 2006
11. Thabrany Hasbullah, SJSN: Tugas Pemerintah Yang Takut Dilaksanakan, diunduh dari http://www.bapepam.go.id/perasuransian/publikasi_asuransi/info_penting_asuransi/SJSN%20Terbaikan%2007.pdf, pada 13 Juni 2010 jam 08.40 WIB.